

**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN  
RAKYAT  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
2018**



INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN  
RAKYAT  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
2018



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN NIAS SELATAN 2018**

ISBN : 978-602-5537-86-8  
No. Publikasi : 12140.1941  
Katalog : 4102004.1214

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm  
Jumlah Halaman : xii + 90 halaman

Naskah:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

Penyunting:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

Gambar Kulit :  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan

Diterbitkan oleh:  
© BPS Kabupaten Nias Selatan

Dicetak oleh:  
*CV. New Creative*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk  
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**Tim Penyusun  
Indikator Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Nias Selatan 2018**

Penanggung Jawab Umum :

Bahar Arif Lubis, S.E.,M.Si.

Penanggung Jawab Teknis :

Trisno Yan Utama Harefa, SST

Penyusun :

Frisca Ulina Br Munthe, S.Tr.Stat.

Nadila Nur Khaliza, S.Tr.Stat.

Penyunting :

Faberlius Hulu, SST

Memori Supersemar Zebua, SST

Gambar Kulit :

Faberlius Hulu, SST



## KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen data statistik, khususnya data publikasi statistik sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan menerbitkan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nias Selatan 2018.

Publikasi ini menyajikan berbagai informasi dasar aspek sosial, meliputi bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, konsumsi dan pengeluaran serta perumahan. Data yang disajikan berupa tabel-tabel dan grafik sederhana sehingga pengguna data dapat dengan mudah melihat variasi tingkat kesejahteraan rakyat di Kabupaten Nias Selatan. Informasi dasar aspek sosial tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa indikator kesejahteraan rakyat secara umum sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk membuat kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberi dukungan atas penerbitan publikasi ini diucapkan terima kasih. Saran dan kritik sangat kami hargai untuk perbaikan di masa mendatang.

Telukdalam, November 2019

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN NIAS SELATAN



Bahar Arif Lubis, SE.,M.Si



## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Sumber Data .....	5
1.4. Sistematika Penyajian .....	5
<b>BAB 2. PENJELASAN TEKNIS</b> .....	<b>7</b>
2.1 Kependudukan .....	9
2.2 Pendidikan .....	10
2.3 Kesehatan dan Gizi .....	11
2.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana .....	12
2.5 Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga .....	12
2.6 Perumahan .....	13
<b>BAB 3. KONDISI UMUM</b> .....	<b>15</b>
3.1. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan.....	17
3.2. Administrasi Pemerintahan .....	23
<b>BAB 4. KEPENDUDUKAN</b> .....	<b>27</b>
4.1. Jumlah Penduduk .....	30
4.2. Struktur Umur dan Beban Tanggungan.....	32
4.3. Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> ) .....	34
4.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk .....	36
<b>BAB 5. PENDIDIKAN</b> .....	<b>37</b>
5.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	39
5.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).....	42
5.3. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan .....	43



5.4.	Rata-rata Lama Sekolah .....	45
5.5.	Angka Buta Huruf .....	46
5.6.	Sarana Pendidikan .....	47
<b>BAB 6.</b>	<b>KESEHATAN.....</b>	<b>51</b>
6.1.	Angka Kesakitan ( <i>Morbidity Rate</i> ) .....	54
6.2.	Penolong Kelahiran .....	55
6.3.	Angka Harapan Hidup.....	56
6.4.	Kesehatan Lingkungan.....	57
6.5.	Tenaga dan Sarana Kesehatan .....	60
<b>BAB 7.</b>	<b>FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA...63</b>	
7.1.	Status Perkawinan .....	65
7.2.	Umur Perkawinan Pertama.....	66
7.3.	Keluarga Berencana .....	67
<b>BAB 8.</b>	<b>KEMISKINAN, POLA KONSUMSI, DAN IPM.....69</b>	
8.1.	Kemiskinan .....	71
8.2.	Pola Konsumsi Rumah Tangga .....	73
8.2.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita.....	73
8.2.2	Persentase Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita/Bulan .....	74
8.3.	Distribusi Pendapatan.....	75
8.4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	78
<b>BAB 9.</b>	<b>PERUMAHAN .....</b>	<b>83</b>
9.1.	Kondisi Rumah .....	86
9.2.	Fasilitas Rumah.....	88

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 3.1.	Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan Menurut Kecamatan, 2015-Sekarang.....	21
Tabel 3.2.	Susunan Bupati Nias Selatan.....	24
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2018 .....	28
Tabel 4.2.	Distribusi Penduduk Kabupaten Nias Selatan Menurut Kelompok Umur Serta Beban Tanggungan, 2018.....	30
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, serta Sex Ratio Kabupaten Nias Selatan, 2018....	32
Tabel 4.4.	Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias Selatan Menurut Kecamatan, 2018 .....	34
Tabel 5.1.	Perkembangan APK dan APM Kabupaten Nias Selatan, 2016-2018 .....	42
Tabel 5.2.	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru serta Jumlah Kekurangan Guru Di Kabupaten Nias Selatan Menurut Tingkat Pendidikan, 2018.....	48
Tabel 6.1.	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018 .....	60
Tabel 6.2.	Jumlah Sarana Kesehatan dan Rasio Sarana Tahun 2018 .....	61
Tabel 7.1.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Nias Selatan, 2018 .....	65
Tabel 8.1.	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2018 .....	77

Tabel 8.2.	Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia.....	79
Tabel 8.3.	Perbandingan Tingkat dan Status Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2016-2018 (Berdasarkan Metode Baru) .....	80
Tabel 9.1.	Kondisi Perumahan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2018 .....	88
Tabel 9.2.	Fasilitas Perumahan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2018 .....	89

## DAFTAR GRAFIK

*Halaman*

Grafik 5.1.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Nias Selatan, 2015-2018 .....	41
Grafik 5.2.	Persentase Penduduk Nias Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2016-2018.....	44
Grafik 5.3.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Nias Selatan dan Sumatera Utara, 2016-2018.....	46
Grafik 5.4.	Perkembangan Tingkat Melek Huruf Penduduk Nias Selatan, 2016-2018 .....	47
Grafik 6.1.	Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Nias Selatan, 2016-2018 .....	54
Grafik 6.2.	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran di Nias Selatan, 2018 .....	55
Grafik 6.3.	Angka Harapan Hidup Penduduk Nias Selatan dan Sumatera Utara, 2016-2018.....	57
Grafik 6.4.	Persentase Rumah Tangga di Nias Selatan Menurut Sumber Air Minum, 2016-2018.....	58
Grafik 6.5.	Persentase Rumah tangga dengan Sanitasi Layak di Nias Selatan dan Sumatera Utara, 2016-2018.....	59
Grafik 7.1.	Persentase Wanita Berusia 10 tahun Ke atas yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Nias Selatan, 2016-2018 .....	66
Grafik 7.2.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat KB di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2018 .....	68
Grafik 8.1.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten di Kepulauan Nias , 2016-2018.....	72
Grafik 8.2.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Nias Selatan, 2016-2018 .....	74

*Halaman*

Grafik 8.3. Persentase Pengeluaran Rumah Tangga untuk Non Makanan di Nias Selatan dan Sumatera Utara, 2016-2018 .....	75
Grafik 8.4. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten di Kepulauan Nias 2016-2018.....	77
Grafik 9.1. Persentase Rumah Tangga di Nias Selatan Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal tahun 2018.....	87

<https://niasselatankab.bps.go.id>

# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

<https://niasselatankab.go.id>



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan secara eksplisit telah dituangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan, implementasi, dan evaluasi hasil pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian maka diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan terkait indikator



kesejahteraan untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nias Selatan 2018 ini dimaksudkan untuk dapat menghimpun, mentabulasikan, merumuskan, menganalisis, dan menyajikan data-data tentang kondisi pembangunan berbagai bidang secara berkesinambungan setiap tahunnya.

Sedangkan tujuan disusunnya publikasi ini adalah memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Nias Selatan. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, perencanaan dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan kejelasan mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan masyarakat yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun akan bersifat efektif dan efisien, utamanya untuk segera melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi yang berdasarkan indikator-indikator yang ada. Pada akhirnya, usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

### **1.3. Sumber Data**

Data yang digunakan sebagai dasar analisis dalam publikasi ini adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari survei, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan survei lainnya yang telah dilaksanakan. Selain itu juga digunakan data sekunder yang berasal dari instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan.

### **1.4. Sistematika Penyajian**

Penyajian data dan analisis dalam publikasi ini terdiri dari 10 (sepuluh) bagian, yaitu :

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nias Selatan 2018. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Sedangkan kondisi umum Kabupaten Nias Selatan meliputi sejarah singkat dan pemerintahannya disajikan di bagian ketiga. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah penduduk, struktur umur dan angka beban tanggungan, rasio jenis kelamin, kepadatan dan distribusi penduduk disajikan di bagian keempat. Pada bagian kelima publikasi ini memaparkan

tentang kondisi pendidikan di Nias Selatan dilanjutkan pembahasan mengenai kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya pada bagian keenam. Aspek fertilitas dan keluarga berencana (KB) dibahas pada bagian ketujuh. Aspek kemiskinan, pola konsumsi, dan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) akan dibahas pada bagian kedelapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nias Selatan 2018 dari aspek perumahan di bagian kesepuluh.

<https://niasselatankab.bps.go.id/>

## **BAB 2**

# **PENJELASAN TEKNIS**

<https://niasselatankab.go.id>



## **BAB II**

### **PENJELASAN TEKNIS**

#### **2.1. Kependudukan**

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan kekuatan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu.

Angka ini dinyatakan dalam banyaknya laki-laki setiap seratus penduduk perempuan.

- Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara kelompok anak-anak (usia 0-14 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun atau lebih) dengan usia produktif (15-64 tahun).

## **2.2. Pendidikan**

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih sekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang

sudah tidak sekolah lagi atau masih sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang yang buta dapat membaca dan menulis huruf *braille* dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

### **2.3. Kesehatan dan Gizi**

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei satu bulan terakhir tidak kambuh penyakitnya.



- Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

#### **2.4. Fertilitas dan Keluarga Berencana**

- Peserta Keluarga Berencana (KB) atau akseptor adalah orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

#### **2.5. Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga**

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak, dan pesta).
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan 52.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah dan juga termasuk

minuman, tembakau dan sirih alam jangka waktu sebulan.

- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- Air sumur/perigi terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut perigi.

## **2.6. Perumahan**

- Bangunan Fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan Sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri. Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Termasuk seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan sensus dan mengurus keperluan sendiri.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain. Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami di bawahnya dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

## **BAB 3**

# **KONDISI UMUM**

<https://niasselatankab.bpt.go.id>



## **BAB III**

### **KONDISI UMUM**

#### **3.1. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan**

Kabupaten Nias Selatan memiliki sejarah kemegahan masa lampau yang tak ternilai harganya. Hal ini bisa dibuktikan dari penemuan kebudayaan megalitik dari masa 3000-5000 tahun sebelum Masehi dengan ditemukannya peninggalan-peninggalan kebudayaan purbakala yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Nias. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti akan asal usul nenek moyang suku Nias atau Suku Ono Niha. Namun banyak anggapan yang menyatakan bahwa nenek moyang suku Nias dahulunya adalah pelaut dan memasuki daerah pedalaman Gomo. Diyakini bahwa dari Kecamatan Gomo inilah penduduk Nias berkembang secara tahap demi tahap ke seluruh pelosok tanah di pulau Nias. Nias Selatan sangat kaya akan berbagai unsur budaya yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti unsur bahasa, hukum adat, kesenian, arsitektur rumah, olahraga, dan pesta-pesta adat, seperti masa panen, perkawinan, pengangkatan gelar dan lain sebagainya.

Kebudayaan Nias ini kurang mendapat pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam, sebaliknya mereka banyak mendapat pengaruh agama Kristen Protestan yang masuk ke daerah ini sejak tahun 1865 dan kemudian datang pula pengaruh agama Katolik terutama di bagian selatan. Nias adalah suku-

bangsa asal yang mendiami pulau Nias dan pulau-pulau sekitarnya, misalnya pulau Hinako, pulau Senau, pulau Lafau, pulau Batu, dan lain-lain, yang keseluruhannya termasuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Masyarakat Nias mempunyai budaya yang unik, antara lain berupa tarian. Tarian khas dari Pulau Nias adalah “Tari Baluse” atau Tari Perang. Dahulu kala, tarian ini merupakan latihan perang para pemuda Nias untuk melatih prajurit menjadi seorang prajurit yang tangguh, yang dapat mengalahkan musuh. Sekarang ini, latihan perang tersebut dijadikan sebagai suatu bentuk tari-tarian untuk melestarikan budaya Nias yang dahulu kala suka berperang. Tarian ini sering digunakan untuk menyambut tamu yang datang mengunjungi Nias. Juga sering dipakai pada upacara-upacara adat. Selain itu, bentuk latihan perang lainnya adalah melompati pagar benteng musuh yang terbuat dari batu atau kayu. Dahulu kala, seorang pemuda Nias baru dapat dikatakan dewasa apabila dapat melompati batu tersebut. Sekarang ini, bentuk latihan tersebut dapat dilihat dalam “Lompat Batu”, yaitu melompati batu setinggi kurang lebih 2,5 meter.

Pada tahun 1946 Daerah Nias berubah menjadi Kabupaten Nias dengan dipimpin oleh seorang Bupati. Pada tahun 1953 dibentuk tiga kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Gido yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan sebagian diambil dari kecamatan Idano Gawo dengan Ibu Kota Lahemo.

2. Kecamatan Gomo yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Idano Gawo dan sebagian dari wilayah Kecamatan Lahusa dengan Ibu Kota Gomo.
3. Kecamatan Alasa yang wilayahnya sebagian diambil dari wilayah Kecamatan Lahewa sebagian dari wilayah Kecamatan Tuhemberua dan sebagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe dengan Ibu Kota Ombolata.

Pada tahun 1956 dibentuk satu kecamatan baru, yaitu kecamatan Sirombu yang wilayahnya sebagian dari wilayah Kecamatan Mandrehe dan sebagian dari wilayah Kecamatan Lolowau. Kemudian berdasarkan PP. No.35 tahun 1992 tanggal 13 Juli 1992 terbentuk dua Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Lolofitu Moi yang wilayahnya sebagian dari Kecamatan Gido dan Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Hiliduho yang wilayahnya Kecamatan Gunungsitoli.

Berdasarkan PP. No. 1 tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 terbentuk dua kecamatan baru, yaitu: a. Kecamatan Amandraya yang wilayahnya sebagian dan kecamatan Teluk Dalam, kecamatan Gomo, dan kecamatan Lahusa. b. Kecamatan Lolomatua yang wilayahnya sebagian dari kecamatan Lolowau. Terakhir, dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan maka melalui Perda Kabupaten Nias No.4 tahun 2000 tanggal 24 Nopember 2000 tentang



Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di kabupaten Nias. Lima kecamatan Pembantu yang masih tersisa selama ini akhirnya ditetapkan sebagai Kecamatan yang definitif. Masing-masing:

1. Kecamatan Hibala yang wilayahnya berasal dari Kecamatan Pulau-pulau Batu.
2. Kecamatan Bawolato yang wilayahnya berasal dari Kecamatan Idano Gawo
3. Kecamatan Namohalu Esiwa wilayahnya sebagian dari Kecamatan Alasa dan Kecamatan Tuhemberua
4. Kecamatan Lotu yang wilayahnya sebagian dan Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lahewa
5. Kecamatan Afulu yang wilayahnya sebagian dan Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Alasa

Desa/kelurahan sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah di Kabupaten Nias terdapat sebanyak 657 buah. Desa/kelurahan tersebut karena persekutuan masyarakat menurut hukum setempat yang dahulunya masing-masing berdiri sendiri-sendiri tanpa ada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang mencakup beberapa atau keseluruhan desa/kelurahan itu.

Selanjutnya berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor: 02/ KPT/2000 tanggal 1 Mei 2000 dan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/K/2002 tanggal 25 Agustus 2002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Nias menjadi dua kabupaten. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2003 maka Kabupaten Nias resmi dimekarkan menjadi dua Kabupaten.

Pada awal pembentukan Kabupaten Nias Selatan wilayah administrasi Nias Selatan terdiri atas 8 kecamatan yaitu:

1. Kepulauan Batu
2. Pulau Hibala
3. Teluk Dalam
4. Amandraya
5. Lahusa
6. Gomo
7. Lolomatua
8. Lolowau

Setelah pembentukan Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari 8 Kecamatan, Kabupaten Nias Selatan mengalami pemekaran wilayah administratif yang sangat signifikan yaitu dari 8 kecamatan dengan 212 desa, menjadi 18 kecamatan dengan 354 desa dan 2 kelurahan pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2015 Kabupaten Nias Selatan mengalami pemekaran wilayah administratif kembali menjadi 35 kecamatan dengan 459 desa dan 2 kelurahan sampai saat ini.

Tabel 3.1. Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan Menurut Kecamatan, 2015-Sekarang

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Tipe Administrasi		Jumlah Desa/ Kelurahan
			Desa	Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hibala	Duru	17	-	17
2	Tanah Masa	Baluta	12	-	12
3	Pulau-pulau Batu	Pasar Pulau Telo	21	1	22

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Tipe Administrasi		Jumlah Desa/ Kelurahan
			Desa	Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pulau-pulau Batu Timur	Labuhan Hiu	10	-	10
5	Simuk	Gobo	6	-	6
6	Pulau-pulau Batu Utara	Bawo Lawindra	9	-	9
7	Pulau-pulau Batu Utara	Silima Banua Marit	12	-	12
8	Teluk Dalam	Pasar Telukdalam	15	1	16
9	Fanayama	Bawomataluo	17	-	17
10	Toma	Hilisataro	14	-	14
11	Maniamolo	Hilisimaetano	14	-	14
12	Mazino	HiliZalootano	11	-	11
13	Luahagundre Mainamolo	Lagundri	10	-	10
14	Onolalu	Hilifalago	10	-	10
15	Amandraya	Tuindrao	21	-	21
16	Aramo	Hilitotao	18	-	18
17	Ulususua	Fondrakoraya	12	-	12
18	Lahusa	BawoOtalua	23	-	23
19	Sidua'ori	Ulu Idanoduo	11	-	11
20	Somambawa	Silimabanua	14	-	14
21	Gomo	Orahili Gomo	11	-	11
22	Susua	Sifalago Susua	18	-	18
23	Mazo	Tetegawaai	10	-	10
24	Umbunasi	Lawindra	11	-	11
25	Idanotae	Hilimbowo	12	-	12
26	Ulu Idanotae	Fanedanu	11	-	11
27	Boronadu	Sifalago Gomo	10	-	10
28	Lolomatua	Hili Otalua	13	-	13
29	Uluoyo	Orahili Uluoyo	13	-	13
30	Huruna	Sifaoroasi	17	-	17
31	Lolowau	Lolowau	14	-	14

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Tipe Administrasi		Jumlah Desa/ Kelurahan
			Desa	Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	Hilimegai	Togizita	10	-	10
33	O'o'u	Hilinamazihono	11	-	11
34	Onohazumba	Fadoro Ewo	10	-	10
35	Hilisalawa Ahe	Maluo	11	-	11
<b>NIAS SELATAN</b>			<b>459</b>	<b>2</b>	<b>461</b>

Sumber : Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

### 3.2. Adminitrasi Pemerintahan

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Pulau Mursala KabupatenTapanuli Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini telah tiga kali periode kepemimpinan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2. Susunan Bupati Nias Selatan  
(Periode 2003-Sekarang)

No.	Nama	Masa Bakti
[1]	[2]	[3]
1	Drs. Edy Aman Saragih, SE.,M.BA	2003-2005
2	Fahuwusa Laia, SH.,MH.	2005-2011
3	Idealisman Dachi	2011-2015
4	Dr. Hilarius Duha, SH.,MH.	2015-Sekarang

Sumber : Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

<https://niasselatankab.bps.go.id>

## **BAB 4**

# **KEPENDUDUKAN**

<https://niasselatankab.go.id>



## **BAB IV**

### **KEPENDUDUKAN**

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak roda pembangunan. Sebaliknya sebagai objek pembangunan, penduduk harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan penduduk harus dipandang dari dua aspek kualitas dan kuantitas.

Dengan demikian pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk, agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan. Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas.

Kondisi kependudukan yang ada sangat memengaruhi dinamika pembangunan yang dilaksanakan, satu kekayaan dan modal dasar pembangunan. Jumlah penduduk yang besar jika disertai dengan kualitas penduduk yang mendukung akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika tidak diiringi dengan kualitas penduduk yang memadai dapat memicu berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, dan papan. Kondisi ini menjadikan penduduk lebih diposisikan sebagai beban pembangunan daripada modal pembangunan.

Oleh karena itu, data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang terkait di antaranya data tentang jumlah



penduduk, struktur umur dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin, dan distribusi serta kepadatan penduduk.

#### 4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nias Selatan pada tahun 2018 mencapai 317.207 jiwa (Proyeksi Penduduk 2010-2020) dengan laju pertumbuhan penduduk dari 2010-2018 rata-rata sebesar 1,14 persen. Jumlah rumah tangga yang ada di Nias Selatan pada tahun 2018 sebanyak 66.091 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4,8, yang berarti secara rata-rata setiap rumah tangga di Nias Selatan mempunyai anggota rumah tangga antara 4 sampai 5 orang.

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa Kecamatan Lahusa merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2018 penduduknya berjumlah 22.486 jiwa. Kecamatan lain yang juga memiliki jumlah penduduk cukup besar adalah Kecamatan Telukdalam yaitu berjumlah 19.683 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Simuk merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni berjumlah 1.252 jiwa.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2018

No.	Kecamatan	Penduduk
[1]	[2]	[3]
1	Hibala	4 578
2	Tanah Masa	3 731
3	Pulau-Pulau Batu	6 679
4	Pulau-Pulau Batu Timur	1 727
5	Simuk	1 252
6	Pulau-Pulau Batu Barat	1 555
7	Pulau-Pulau Batu Utara	2 517
8	Telukdalam	19 683
9	Fanayama	18 933
10	Toma	10 667
11	Maniamolo	10 086

No.	Kecamatan	Penduduk
[1]	[2]	[3]
12	Mazino	11 248
13	Luahagundre Maniamolo	8 696
14	Onolalu	5 431
15	Amandraya	10 782
16	Aramo	15 045
17	Ulususua	11 504
18	Lahusa	22 486
19	Sidua'ori	7 463
20	Somambawa	12 657
21	Gomo	9 905
22	Susua	18 991
23	Mazo	10 343
24	Umbunasi	10 481
25	Idanotae	10 122
26	Ulu Idanotae	6 647
27	Boronadu	8 580
28	Lolomatua	8 141
29	Ulnoyo	9 372
30	Huruna	10 631
31	Lolowau	5 984
32	Hilimegai	5 790
33	O'o'u	5 981
34	Onohazumba	5 083
35	Hilisalawa Ahe	4 436
<b>NIAS SELATAN</b>		<b>317 207</b>

Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan (Proyeksi Penduduk 2010-2035)

## 4.2. Struktur Umur dan Beban Tanggungan

Struktur umur penduduk dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: kelompok umur muda (dibawah 15 tahun), kelompok umur produktif (15-64 tahun), dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas).

Tabel 4.2. Distribusi Penduduk Kabupaten Nias Selatan Menurut Kelompok Umur Serta Beban Tanggungan, 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]
0 – 4	20 410	20 249	40 659
5 – 9	21 687	20 814	42 501
10 – 14	19 997	18 779	38 776
15 – 19	16 734	16 674	33 408
20 – 24	14 035	15 218	29 253
25 – 29	11 070	12 350	23 420
30 – 34	10 179	11 304	21 483
35 – 39	9 181	9 760	18 941
40 – 44	7 816	8 588	16 404
45 – 49	7 257	7 459	14 716
50 – 54	5 655	5 919	11 574
55 – 59	4 510	4 673	9 183
60 – 64	4 717	4 052	8 769
65 – 69	2 344	1 955	4 299
70 – 74	1 080	1 063	2 143
75 +	854	824	1 678
Jumlah	157 526	159 681	317 207
Angka Beban Tanggungan Anak	68,12	62,34	65,15
Angka Beban Tanggungan Tua	4,69	4,00	4,34
Angka Beban Tanggungan Total	72,81	66,34	69,49

Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan (Proyeksi Penduduk 2010-2035)

Pada tahun 2018, lebih dari separuh penduduk Nias Selatan adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) dengan capaian 187.151 jiwa atau 59,0 persen, kemudian kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 121.936 jiwa atau 38,4 persen dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 8.120 jiwa atau 2,6 persen.

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) total sebesar 69,5 persen, artinya setiap seratus orang berusia produktif di Kabupaten Nias Selatan menanggung 69 sampai 70 orang yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Dari indikator Angka Beban Tanggungan juga terlihat bahwa pada tahun 2018, setiap seratus penduduk usia produktif Kabupaten Nias Selatan dibebani tanggung jawab terhadap 65 sampai 66 orang penduduk usia anak-anak dan 4 sampai 5 orang penduduk usia lanjut.

Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan semakin tinggi Angka Beban Tanggungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif, untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya.

Dengan Angka Beban Tanggungan sebesar 69,5 persen, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan di Nias Selatan tergolong dalam ketergantungan tinggi, jika dilihat dari kategori angka ketergantungan yaitu:

- Angka Beban Tanggungan Tinggi :  $\geq 70$
- Angka Beban Tanggungan Sedang : 51 – 69
- Angka Beban Tanggungan Rendah :  $\leq 50$

#### **4.3. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)**

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Jumlah penduduk laki-laki di Nias Selatan umumnya lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan. Berdasarkan proyeksi

penduduk 2010-2035, pada tahun 2018 diketahui jumlah penduduk laki-laki di Nias Selatan 157.526 jiwa dan perempuan 159.681 jiwa, atau rasio jenis kelamin sebesar 98,7, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 sampai 99 penduduk laki-laki.

Berdasarkan wilayah, pada tahun 2018 rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Onolalau yakni sebesar 105 persen. Sebaliknya, rasio jenis kelamin paling rendah adalah di Kecamatan Simuk sebesar 87,7 persen. Secara umum, data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, serta Sex Ratio Kabupaten Nias Selatan, 2018

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Hibala	2 285	2 293	4 578	99,65
2	Tanah Masa	1 858	1 873	3 731	99,20
3	Pulau-Pulau Batu	3 365	3 314	6 679	101,54
4	Pulau-Pulau Batu Timur	879	848	1 727	103,66
5	Simuk	585	667	1 252	87,71
6	Pulau-Pulau Batu Barat	749	806	1 555	92,93
7	Pulau-Pulau Batu Utara	1 233	1 284	2 517	96,03
8	Telukdalam	9 998	9 685	19 683	103,23
9	Fanayama	9 652	9 281	18 933	104,00
10	Toma	5 357	5 310	10 667	100,89
11	Maniamolo	5 163	4 923	10 086	104,88
12	Mazino	5 593	5 655	11 248	98,90
13	Luahagundre Maniamolo	4 403	4 293	8 696	102,56

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
14	Onolalau	2 782	2 649	5 431	105,02
15	Amandraya	5 436	5 346	10 782	101,68
16	Aramo	7 579	7 466	15 045	101,51
17	Ulususua	5 665	5 839	11 504	97,02
18	Lahusa	11 288	11 198	22 486	100,80
19	Sidua'ori	3 687	3 776	7 463	97,64
20	Somambawa	6 189	6 468	12 657	95,69
21	G o m o	4 813	5 092	9 905	94,52
22	Susua	9 356	9 635	18 991	97,10
23	Mazo	4 956	5 387	10 343	92,00
24	Umbunasi	5 132	5 349	10 481	95,94
25	Idanotae	4 919	5 203	10 122	94,54
26	Ulu Idanotae	3 236	3 411	6 647	94,87
27	Boronadu	4 237	4 343	8 580	97,56
28	Lolomatua	3 998	4 143	8 141	96,50
29	Ulunoyo	4 554	4 818	9 372	94,52
30	Huruna	5 089	5 542	10 631	91,83
31	Lolowau	2 993	2 991	5 984	100,07
32	Hilimegai	2 831	2 959	5 790	95,67
33	O'o'u	3 025	2 956	5 981	102,33
34	Onohazumba	2 443	2 640	5 083	92,54
35	Hilisalawa Ahe	2 198	2 238	4 436	98,21
<b>Nias Selatan</b>		<b>157 526</b>	<b>159 681</b>	<b>317 207</b>	<b>98,65</b>

Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan (Proyeksi Penduduk 2010-2035)

#### 4.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah masih timpangnya penyebaran penduduk antarwilayah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kecamatan belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi seperti pasar ataupun pertokoan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk

tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antardaerah.

Bila dilihat distribusi penduduk Nias Selatan menurut kecamatan, tampak bahwa sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Lahusa, Telukdalam, Susua, dan Fanayama. Kecamatan Lahusa dengan luas 3,2 persen dari wilayah Nias Selatan dihuni oleh 7,1 persen penduduk Nias Selatan. Kecamatan Telukdalam dengan luas 1,7 persen dari wilayah Nias Selatan dihuni oleh 6,2 persen penduduk Nias Selatan. Kecamatan Susua dengan luas 1,1 persen dari wilayah Nias Selatan dihuni oleh 6,0 persen penduduk Nias Selatan, dan Kecamatan Fanayama dengan luas 3,3 persen dari luas wilayah Nias Selatan dihuni oleh 6,0 persen penduduk Nias Selatan. Sebaliknya Kecamatan Simuk hanya dihuni oleh 0,4 persen penduduk Nias Selatan dan memiliki luas 0,8 persen dari luas Nias Selatan, seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias Selatan Menurut Kecamatan, 2018

No.	Kecamatan	Distribusi Penduduk	Distribusi Luas	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
		%	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Hibala	1,44	9,07	20,28
2	Tanah Masa	1,18	18,14	8,26
3	Pulau-Pulau Batu	2,11	4,22	63,56
4	Pulau-Pulau Batu Timur	0,54	14,95	4,64
5	Simuk	0,40	0,82	61,31
6	Pulau-Pulau Batu Barat	0,49	0,85	73,84
7	Pulau-Pulau Batu Utara	0,79	0,25	399,52
8	Telukdalam	6,20	1,66	476,59
9	Fanayama	5,97	3,32	229,52
10	Toma	3,36	1,66	258,53
11	Maniamolo	3,18	3,03	133,91

No.	Kecamatan	Distribusi Penduduk	Distribusi Luas	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
		%	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
12	Mazino	3,55	1,59	284,83
13	Luahagundre Maniamolo	2,74	2,03	172,57
14	Onolalau	1,71	1,02	214,07
15	Amandraya	3,40	3,09	140,46
16	Aramo	4,74	2,55	236,97
17	Ulususia	3,63	2,3	201,19
18	Lahusa	7,09	3,23	279,82
19	Sidua'ori	2,35	2,51	119,60
20	Somambawa	3,99	1,63	311,52
21	G o m o	3,12	1,51	263,71
22	Susua	5,99	1,13	672,72
23	Mazo	3,26	1,17	356,29
24	Umbunasi	3,30	1,32	319,45
25	Idanotae	3,19	1,14	357,54
26	Ulu Idanotae	2,10	0,58	463,85
27	Boronadu	2,70	1,18	292,53
28	Lolomatua	2,57	0,87	377,07
29	Uluoyo	2,95	1,97	191,30
30	Huruna	3,35	1,98	215,68
31	Lolowau	1,89	1,93	124,59
32	Hilimegai	1,83	1,61	144,21
33	O'o'u	1,89	2,94	81,75
34	Onohazumba	1,60	1,14	178,66
35	Hilisalawa Ahe	1,40	1,62	110,38
<b>Nias Selatan</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>127,50</b>

Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan

Kepadatan penduduk Nias Selatan tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara. Pada tahun 2018 kepadatan penduduk Nias Selatan sebesar 128 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Sumatera Utara 198 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Susua merupakan yang terpadat penduduknya, dengan kepadatan sekitar 673 jiwa per kilometer



persegi, sedangkan Pulau-pulau Batu Timur merupakan kecamatan yang terjarang penduduknya dengan kepadatan sekitar 5 jiwa per kilometer persegi.

<https://niasselatankab.bps.go.id>

## **BAB 5**

# **PENDIDIKAN**

<https://niasselatankab.go.id>



## **BAB V**

### **PENDIDIKAN**

Masalah pendidikan merupakan salah satu masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sektor pendidikan merupakan suatu subsistem dari sistem pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kuat. Dengan diberlakukannya sistem perdagangan bebas mengharuskan setiap daerah memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan menjadi kunci utama mengatasi kompetisi global di masa mendatang.

Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat sehingga manusia terlepas dari kemiskinan dan kelaparan. Sebagaimana salah satu dari delapan tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) tentang pemerataan pendidikan dasar menargetkan bahwa pada tahun 2015 semua anak Indonesia, laki-laki, dan perempuan tidak ada lagi yang tidak mendapat pendidikan dasar. Bahkan pemerintah Indonesia jauh sebelumnya telah mencanangkan program wajib belajar 6 tahun (SD) pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP) pada tahun 1994. Lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) terkait bidang pendidikan adalah dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu tujuan dari SDGs adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2030, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary school*).

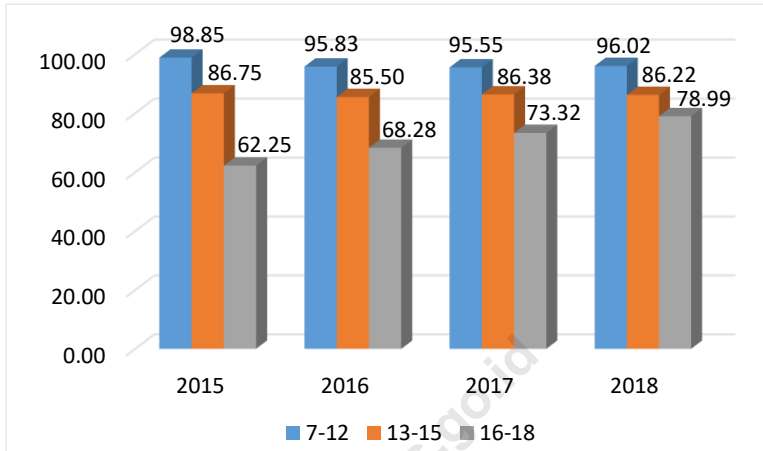
Disadari bahwa meskipun upaya perbaikan pendidikan telah berlangsung cukup lama, namun mutu pendidikan masih belum memenuhi harapan. Terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu faktor internal yang menyangkut

efektivitas proses belajar mengajar yang bergantung pada sarana dan prasarana belajar, kualitas dan kuantitas pengajar, metode mengajar dan kurikulum, serta pengelolaan sekolah. Faktor kedua adalah faktor eksternal menyangkut peran orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan kondisi demikian maka dapat dikatakan bahwa dunia pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi peran seluruh lapisan masyarakat dan keluarga sangat dibutuhkan.

### **5.1. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS juga sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

APS merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah, yaitu usia 7-12 tahun sebagai jenjang pendidikan SD/ sederajat, usia 13-15 tahun sebagai jenjang pendidikan SMP/ sederajat, dan usia 16-18 tahun pada pendidikan SMA/ SMK/ sederajat. Secara umum pada tingkat pendidikan dasar tingkat partisipasi sekolah masih cukup tinggi, namun angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.



Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan (SUSENAS 2015-2018)

Grafik 5.1. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Nias Selatan, 2015-2018

Grafik 5.1 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Nias Selatan menunjukkan persentase yang fluktuatif dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2015, penduduk kelompok umur 7-12 tahun yang sedang sekolah sebesar 98,8 persen, menurun di tahun 2016 menjadi 95,8 persen, dan kembali menurun lagi di tahun 2017 menjadi 95,6 persen, akan tetapi mulai meningkat kembali menjadi 96,0 di tahun 2018. Fluktuasi pada rata-rata tingkat partisipasi sekolah juga terjadi untuk kelompok umur 13-15. Pada tahun 2015, penduduk kelompok umur 13-15 yang bersekolah tercatat sebesar 86,8 persen, kemudian menurun menjadi 85,5 persen di tahun 2016, dan kembali meningkat menjadi 86,4 persen di tahun 2017, namun kembali mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 86,2 persen. Sedangkan untuk kelompok umur 16-18, terus terjadi peningkatan rata-rata tingkat partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 untuk kelompok usia 16-18 tahun tercatat sebesar 62,2 persen yang bersekolah, kemudian meningkat menjadi menjadi 68,3

persen di tahun 2016, dan terus meningkat menjadi 73,3 persen di tahun 2017 hingga posisi terakhir tercatat sebesar 78,9 di tahun 2018.

## 5.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator pendidikan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu untuk setiap 100 penduduk usia sekolah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi APK suatu daerah maka semakin banyak penduduk di daerah tersebut yang berhasil mengenyam pendidikan pada jenjang tertentu.

Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa angka partisipasi kasar jenjang pendidikan SD di Nias Selatan tahun 2018 sebesar 105,47 persen. Nilai APK lebih dari 100 persen, menunjukkan bahwa dapat dijumpai siswa yang bersekolah pada jenjang SD berusia di luar batas usia SD. Hal yang berbeda terjadi pada jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK. APK pada tingkat SMP dan SMA/SMK kurang dari 100 persen, menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun yang seharusnya sedang bersekolah tetapi tidak bersekolah.

Tabel 5.1. Perkembangan APK dan APM Kabupaten Nias Selatan, 2016-2018

Jenjang Pendidikan	APK			APM		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
SD/MI	109,34	105,07	105,47	95,83	95,55	96,02
SMP/MTs	82,98	82,63	78,07	74,10	72,27	69,16
SMA/MA	73,67	77,68	98,41	57,92	61,43	64,92

Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan (SUSENAS 2016-2018)

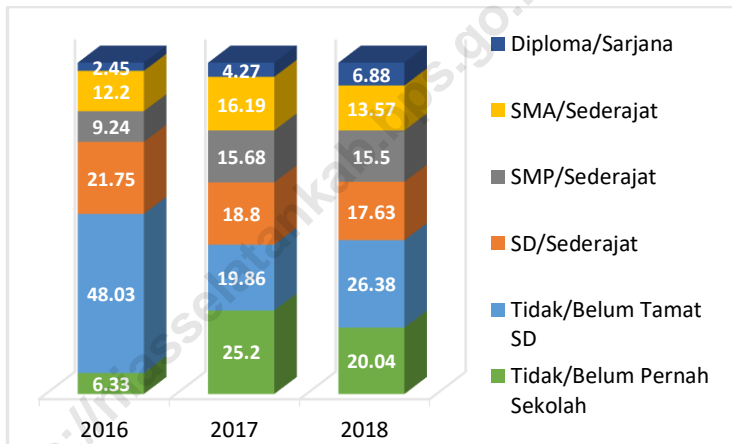
Selain Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator keberhasilan program pendidikan. APM adalah banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 persen penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah SD adalah 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, dan SMU/SMK 16-18 tahun. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa APM tingkat SD di Nias Selatan sebesar 96,0 persen, menggambarkan bahwa dari 100 persen penduduk usia SD baru 96,0 persen yang bersekolah sesuai standar usia sekolahnya. APM tingkat SD tahun 2018 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana APM tingkat SD tahun 2017 sebesar 95,6 persen dan menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016 dengan nilai APM sebesar 95,8. Akan tetapi, perubahan APM tingkat SD tidak berbanding lurus dengan perubahan APM tingkat SMP. APM di tingkat SMP selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami penurunan, yaitu dengan nilai APM tingkat SMP sebesar 74,1 di tahun 2016 kemudian turun menjadi 72,3 di tahun 2017, dan terakhir menjadi 69,2 di tahun 2018. Fenomena ini berbanding terbalik dengan APM di tingkat SMA. Dari tahun 2016 hingga 2018, APM tingkat SMA terus mengalami kenaikan. APM tingkat SMA di tahun 2016 tercatat sebesar 57,9 kemudian mengalami peningkatan menjadi 61,4 di tahun 2017, dan terakhir menjadi 64,9 pada tahun 2018

### **5.3. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan**

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin baik pula capaian keberhasilan pembangunan daerahnya. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu penghambat dalam percepatan pembangunan.



Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas, yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.



Grafik 5.2. Persentase Penduduk Nias Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan, 2016-2018

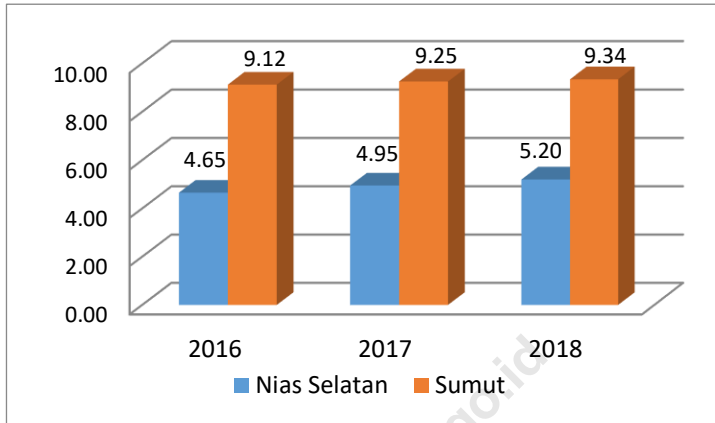
Berdasarkan data Susenas 2016-2018, tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Nias Selatan secara keseluruhan mengalami perubahan yang fluktuatif. Hanya tamatan diploma maupun sarjana yang selalu meningkat dari tahun 2016 hingga 2018 dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,2 persen per tahun. Pada tahun 2016, sebesar 2,4 persen penduduk Nias Selatan merupakan tamatan diploma/sarjana, nilai ini kemudian meningkat menjadi 4,3 persen di tahun 2017, kemudian menjadi 6,9 persen pada tahun 2018. Sebaliknya, penduduk Nias Selatan

yang tamat SD/ sederajat terus mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016, penduduk Nias Selatan yang tamat SD/ sederajat sebesar 21,8 persen, kemudian menurun menjadi 18,8 persen di tahun 2017, serta kembali turun menjadi 17,6 persen pada tahun 2018.

Sementara itu, persentase penduduk Nias Selatan yang tidak/ belum pernah sekolah maupun tidak/ belum pernah tamat SD, serta tamatan SMP, dan SMA mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018. Fluktuasi yang cukup besar terlihat pada persentase penduduk Nias Selatan yang tidak/ belum tamat SD, pada tahun 2016 nilainya sebesar 48,0 persen kemudian menurun menjadi 19,9 persen di tahun 2017, dan kembali meningkat menjadi 26,4 persen pada tahun 2018. Pola fluktuasi ini serupa dengan pola perubahan persentase penduduk di Nias Selatan yang merupakan tamatan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Pada tahun 2016, penduduk Nias Selatan yang tamat SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat masing-masing sebesar 9,2 dan 12,2 persen, kemudian meningkat menjadi 15,7 dan 16,2 persen pada tahun 2017, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 15,5 dan 13,6 persen.

#### **5.4. Rata-rata Lama Sekolah**

Indikator pendidikan lain yang dapat dijadikan sebagai ukuran kualitas pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 10 tahun ke atas di Nias Selatan cenderung tetap atau tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2018 tercatat rata-rata lama sekolah penduduk Nias Selatan sebesar 5,20 tahun yang artinya rata-rata penduduk usia 10 tahun ke atas di Nias Selatan bersekolah sampai kelas 5 SD. Seperti terlihat pada Grafik 5.3 rata-rata lama sekolah penduduk Nias Selatan menunjukkan kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2018.



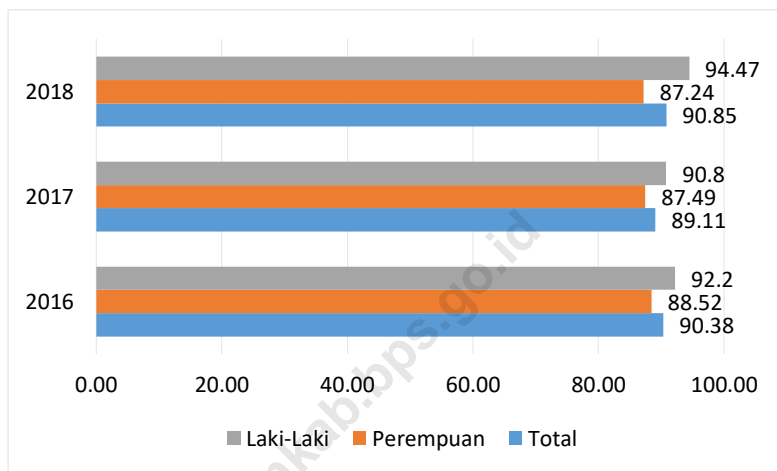
Grafik 5.3. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Nias Selatan dan Sumatera Utara, 2016-2018

### 5.5. Angka Buta Huruf

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis (melek huruf) untuk penduduk berusia 10 tahun ke atas. Tingkat melek huruf atau sebaliknya angka buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan dan mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Berdasarkan data tahun 2018, persentase penduduk melek huruf secara keseluruhan mencapai 90,8 persen, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2017 yaitu 89,1 persen tetapi nilai 2017 ini menurun lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu 90,4 persen. Bila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, persentase melek huruf penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2016, persentase penduduk laki-laki yang melek huruf sebesar 92,2 persen dan perempuan sebesar 88,5 persen. Hal senada juga

terlihat pada tahun 2017 dan 2018, persentase penduduk laki-laki yang melek huruf sebesar 90,8 dan 94,5 persen, sedangkan perempuan sebesar 87,5 dan 87,2 persen.



Grafik 5.4. Perkembangan Tingkat Melek Huruf Penduduk Nias Selatan, 2016-2018

## 5.6. Sarana Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan guna mewujudkan keberhasilan dunia pendidikan. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengajar, kecukupan jumlah gedung sekolah, dan ruang kelas yang memadai akan mendorong percepatan pembangunan di bidang pendidikan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Data Dapodik Semester Ganjil T.A. 2017/2018, pada tahun 2018 banyaknya jumlah Sekolah Dasar (SD) sederajat di Nias Selatan tercatat sebanyak 343 sekolah. Banyaknya siswa yang tertampung sebanyak 47.978 orang. Pada jenjang Sekolah

Menengah Pertama (SMP) sederajat terdapat 130 sekolah. Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP sebanyak 20.377 orang. Sementara itu, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah tercatat sebanyak 65 sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nias Selatan tercatat sebanyak 47 sekolah. Banyaknya siswa pada jenjang SMA dan Madrasah Aliyah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 12.323 orang, dan siswa yang bersekolah di SMK tercatat sebanyak 7.765 orang.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kecukupan sarana pendidikan di suatu daerah di antaranya adalah rasio siswa terhadap guru. Jumlah guru yang sebanding dengan jumlah siswa merupakan salah satu prasyarat agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Standar ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional adalah 1:20 untuk tingkat SD/SMP/SMA dan 1:15 untuk MI/MTs/MA/SMK sebagaimana tercantum dalam PP No.74 tahun 2008 tentang Guru.

Tabel 5.2. Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru serta Jumlah Kekurangan Guru Di Kabupaten Nias Selatan Menurut Tingkat Pendidikan, 2018

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Siswa	Guru	Rasio Siswa Guru	Kekurangan Guru
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	SD/ Madrasah Ibtidaiyah	343	47.978	3.237	1:15	-
2	SMP/ Madrasah Tsanawiyah	130	20.377	1.503	1:14	-
3	SMA/ Madrasah Aliyah	65	12.323	807	1:15	-
4	SMK	47	7765	706	1:11	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Data Dapodik Semester Ganjil T.A. 2017/2018

Keterangan: - ) Sudah mencukupi

Secara umum jumlah guru yang ada di Nias Selatan telah mencukupi pada semua jenjang pendidikan. Hal ini terlihat dari rasio guru dengan siswa SD sederajat 1:15, artinya bahwa rata-rata seorang guru mengajar 15 orang siswa pada jenjang SD. Pada jenjang SMP sederajat rata-rata seorang guru mengajar 14 orang siswa dan SMA maupun Madrasah Aliyah rata-rata seorang guru mengajar 15 orang siswa. Sedangkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rata-rata seorang guru mengajar 11 orang siswa. Kondisi ini menggambarkan salah satu indikator kecukupan tenaga pengajar di Nias Selatan. Namun demikian ketersediaan tenaga pengajar juga perlu diperhatikan dari sisi pemerataannya. Tenaga pengajar yang ada diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu saja.



**BAB 6**

**KESEHATAN**

<https://niasselatankab.go.id>





## BAB VI

### KESEHATAN

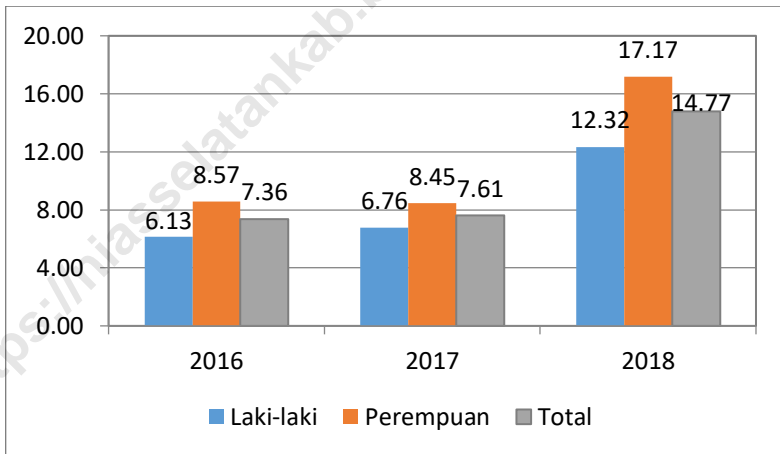
Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di masa depan yang ingin dicapai adalah semua lapisan masyarakat memperoleh kesehatan secara mudah, murah dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Derajat kesehatan dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan suatu negara adalah mortalitas, morbiditas, dan status gizi. Mortalitas dapat dilihat dari empat indikator, yaitu angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, dan angka harapan hidup. Sedangkan status gizi salah satunya dapat dilihat dari persentase balita dengan status gizi di bawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS).

Adapun faktor lain yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah ketersediaan dan kecukupan sarana maupun prasarana kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang memadai, serta asupan makanan bergizi. Untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat suatu daerah, beberapa indikator yang sering digunakan di antaranya adalah tingkat kesakitan (*morbidity rate*), tenaga penolong kelahiran, angka kematian bayi (*infant mortality rate/imr*), dan angka harapan hidup ( $e^o$ ).

### 6.1. Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, menunjukkan bahwa derajat kesehatan suatu daerah masih rendah, demikian sebaliknya, apabila angka kesakitan penduduk rendah, menunjukkan derajat kesehatan di daerah tersebut semakin baik. Angka kesakitan ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan berdasarkan jenis keluhan yang dideritanya.



Sumber: BPS Nias Selatan (SUSENAS 2016-2018)

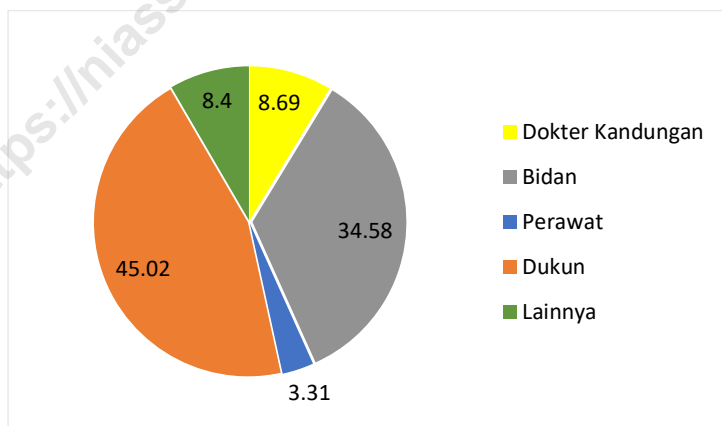
Grafik 6.1. Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Nias Selatan, 2016-2018

Berdasarkan data Susenas 2016 sampai dengan 2018, tingkat morbiditas di Nias Selatan menunjukkan pola kenaikan. Pada tahun 2016 sebesar 7,4 persen penduduk Nias

Selatan mengalami keluhan kesehatan selama satu bulan terakhir. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7,6 persen dan tahun 2018 kembali meningkat menjadi 14,8 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya laki-laki lebih sedikit mengalami keluhan kesehatan daripada perempuan. Pada tahun 2018 sebesar 12,3 persen penduduk laki-laki mengalami keluhan kesehatan, sedangkan perempuan 17,2 persen.

## 6.2. Penolong Kelahiran

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, di antaranya oleh penolong kelahiran bayi. Hal tersebut dapat dijadikan indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan ditolong oleh dukun dan lainnya.



Sumber: BPS Nias Selatan (SUSENAS 2018)

Grafik 6.2. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran di Nias Selatan, 2018

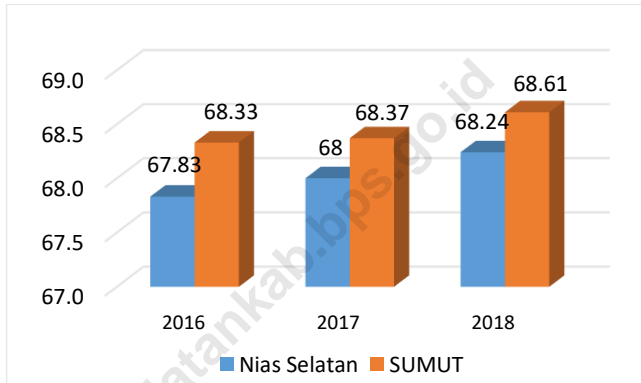
Pada tahun 2018 penolong kelahiran balita di Nias Selatan didominasi oleh dukun sebesar 45,0 persen. Kemudian diikuti oleh bidan sebesar 34,6 persen dan dokter kandungan sebesar 8,7 persen, serta 3,3 persen oleh perawat dan 8,4 persen sisanya oleh penolong kelahiran lainnya di luar kategori yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk persentase kelahiran balita yang ditolong oleh dokter umum pada tahun 2018 adalah 0 persen.

### **6.3. Angka Harapan Hidup ( $e^0$ )**

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan taraf kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat sehingga membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.

Angka harapan hidup di Nias Selatan dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2018 angka harapan hidup di Nias Selatan tercatat sebesar 68,2 tahun yang berarti pada tahun 2018 seorang bayi yang baru lahir akan bertahan hidup antara usia 68 sampai dengan 69 tahun. Angka harapan hidup penduduk Nias Selatan meningkat dari 68,0 tahun pada 2017 dan 67,8 tahun pada 2016.

Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, rata-rata angka harapan hidup penduduk Nias Selatan masih lebih rendah dari rata-rata Sumatera Utara. Pada tahun 2018 rata-rata harapan hidup Sumatera Utara tercatat sebesar 68,9. Kondisi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 angka harapan hidup Sumatera Utara sebesar 68,3 dan tahun 2017 sebesar 68,4 tahun.



Grafik 6.3. Angka Harapan Hidup Penduduk Nias Selatan dan Sumatera Utara, 2016-2018

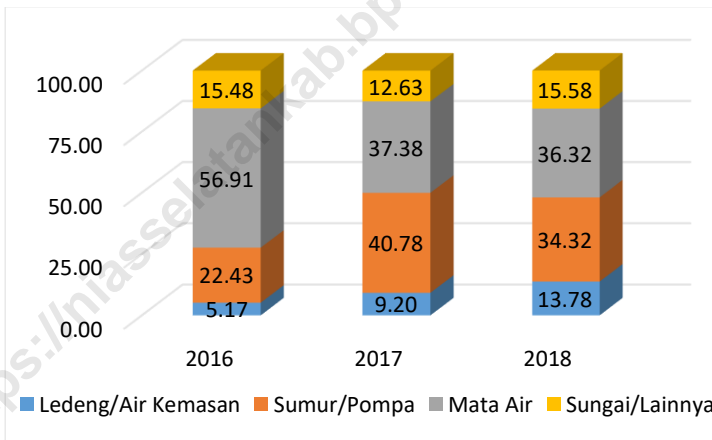
Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi dan kesehatan serta lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

#### 6.4. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tidak layak, kumuh, dan tidak higienis menjadi sumber dari segala macam penyakit. Indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak.

Air minum bersih adalah air minum yang bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  meter. Sedangkan air minum layak adalah air minum yang sumbernya berasal dari leding, air hujan, sumur/bor pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  meter.

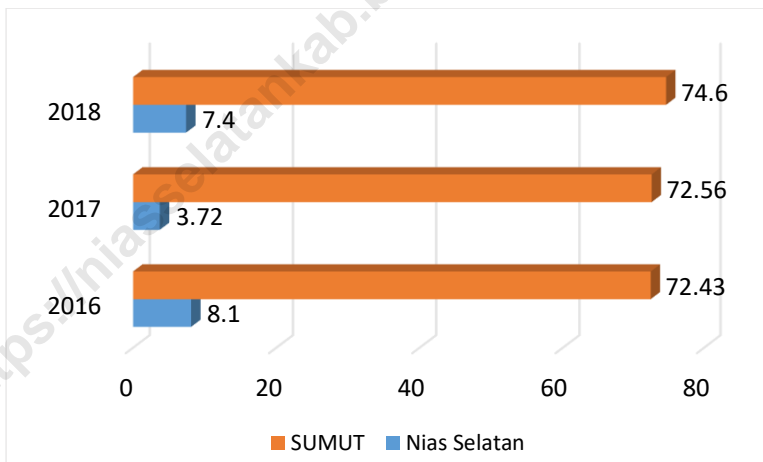


Grafik 6.4. Persentase Rumah Tangga di Nias Selatan Menurut Sumber Air Minum, 2016-2018

Pada tahun 2018 persentase rumah tangga di Nias Selatan yang menggunakan leding dan air kemasan sebagai sumber air minum yang diyakini secara kesehatan lebih terjamin meningkat dari tahun sebelumnya. Tercatat sebesar 13,8 persen rumah tangga menggunakan leding dan air kemasan sebagai sumber air minum. Sebesar 34,3 persen

rumah tangga menggunakan sumur/pompa, lebih sedikit dari yang menggunakan mata air yaitu, sebesar 36,3 persen. Sisanya menggunakan air sungai dan lainnya yaitu sebesar 15,6 persen sebagai sumber air minum.

Indikator kesehatan lingkungan selanjutnya adalah akses terhadap sanitasi layak. Rumah tangga dinyatakan mempunyai akses sanitasi (sanitasi layak) apabila rumah tangga tersebut mempunyai fasilitas buang air besar sendiri dan bersama, menggunakan kloset leher angsa, serta menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja. Dengan menggunakan tangki septik maka akan terhindar dari pencemaran lingkungan, terutama sumber air minum sumur/pompa dan mata air oleh limbah manusia.



Grafik 6.5. Persentase Rumah tangga dengan Sanitasi Layak di Nias Selatan dan Sumatera Utara, 2016-2018

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir persentase rumah tangga di Nias Selatan yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami penurunan dari 8,1 persen tahun 2016 menjadi 3,7 persen tahun 2017 dan di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 7,4 persen. Sementara untuk



Sumatera Utara sudah mencapai 74,6 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2018.

## 6.5. Tenaga dan Sarana Kesehatan

Salah satu sasaran pembangunan di bidang kesehatan adalah masyarakat memperoleh akses kesehatan secara mudah, murah, dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut dapat terwujud apabila tenaga kesehatan suatu daerah telah tersedia secara merata dan rasio ideal antara jumlah penduduk dan tenaga kesehatan terpenuhi. Begitu juga ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kondisinya dalam keadaan baik.

Ketersediaan tenaga dan sarana kesehatan yang memadai menjadi syarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat kecukupan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan disuatu daerah adalah rasio antara tenaga kesehatan dan sarana kesehatan per 100.000 penduduk.

Tabel 6.1. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018

Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga	Rasio per 100.000 Penduduk
Tenaga Medis	28	9
Tenaga Keperawatan	753	237
Tenaga Kebidanan	772	243
Tenaga Kefarmasian	31	10
Tenaga Kesehatan Lainnya	12	4
Dokter Spesialis	2	1
Dokter Umum	31	10
Dokter Gigi	1	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan

Kondisi jumlah tenaga kesehatan di Nias Selatan tahun 2018 didominasi oleh tenaga kesehatan kebidanan sebanyak 772 orang atau 243 orang per 100.000 penduduk, kemudian tenaga keperawatan sebanyak 753 orang atau 237 orang per 100.000 penduduk. Tenaga kesehatan dokter sebanyak 31 orang atau 10 orang per 100.000 penduduk.

Keberadaan dan kualitas sarana kesehatan yang ada di Nias Selatan di tahun 2018 terdapat 2 unit rumah sakit umum, 36 unit puskesmas, 57 puskesmas pembantu, dan 9 Posyandu.

Tabel 6.2. Jumlah Sarana Kesehatan dan Rasio Sarana Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018

Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas	Rasio per 100.000 Penduduk
Rumah Sakit	2	1
Puskesmas	36	11
Puskesmas Pembantu	57	17
Posyandu	9	3
Klinik/ Balai Kesehatan	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan



## **BAB 7**

# **FERTILITAS DAN KB**

<https://niasselatankab.go.id>



## BAB VII

### FERTILITAS DAN KB

#### 7.1. Status Perkawinan

Status perkawinan dalam suatu rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Rumah tangga yang lengkap yang terdiri dari suami/istri (berstatus kawin) memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan rumah tangga dengan asumsi masing-masing bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Bila dibandingkan dengan mereka yang berstatus cerai hidup dan cerai mati, kesempatan mereka yang berstatus kawin untuk memberikan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya dapat lebih baik.

Kondisi tahun 2018 memperlihatkan sebanyak 46,14 persen penduduk Nias Selatan usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin. Sebanyak 47,08 persen berstatus kawin dan 0,73 persen berstatus cerai hidup serta 6,05 persen cerai mati. Persentase perempuan yang mengalami cerai mati lebih tinggi dari laki-laki, yaitu sebanyak 9,30 persen perempuan berstatus cerai mati sedangkan laki-laki hanya 2,78 persen.

Tabel 7.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Nias Selatan, 2018

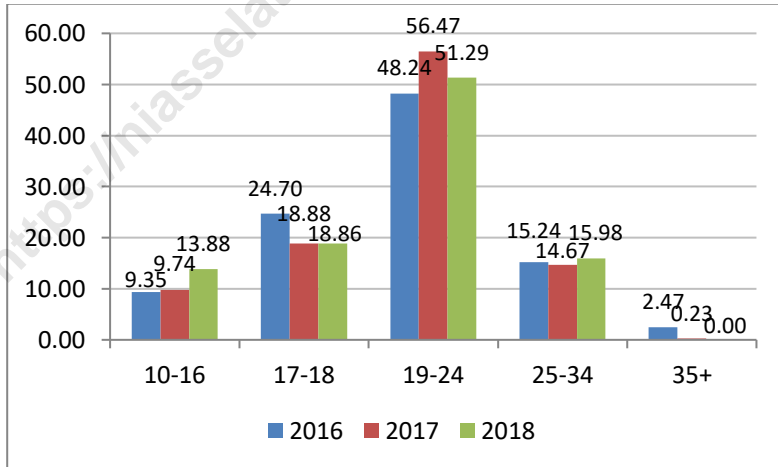
Jenis Kelamin	Status Perkawinan			
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Laki-laki	49,61	46,33	1,28	2,78
Perempuan	42,69	47,83	0,18	9,30
Laki-laki + Perempuan	46,14	47,08	0,73	6,05

Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan (Susenas 2018)

## 7.2. Umur Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi status kawin. Kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini , definisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah maka semakin panjang usia reproduksinya sehingga semakin besar pula kemungkinannya melahirkan anak.



Grafik 7.1. Persentase Wanita Berusia 10 tahun Ke atas yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Nias Selatan, 2016-2018

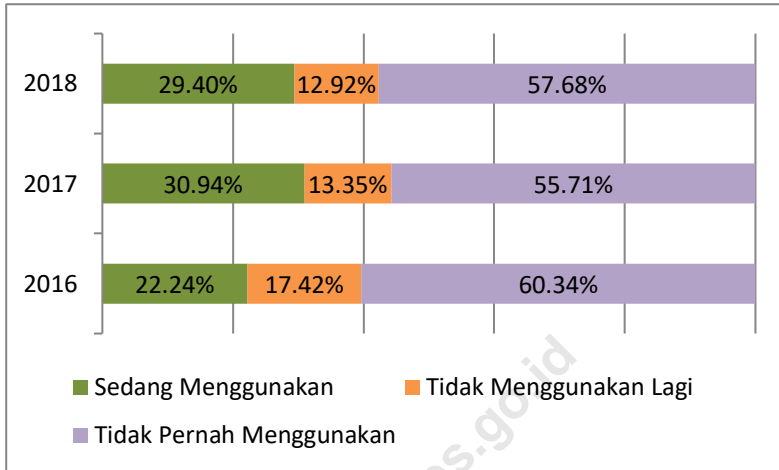
Berdasarkan Grafik 7.1, rata-rata usia perkawinan pertama wanita di Nias Selatan pada tahun 2018 berada di kelompok umur 19-24 tahun dengan persentase 51,29 persen. Dari grafik juga terlihat adanya pola fluktuatif persentase usia perkawinan pertama wanita di Nias Selatan. Pada kelompok umur 10-16 tahun, 17-18 tahun dan 19-24 tahun terus mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan pada kelompok umur 25-34 tahun dan 35+ tahun.

### **7.3. Keluarga Berencana**

Pada dasarnya program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Program ini bertujuan membentuk keluarga kecil bahagia sejahtera. Dengan mengurangi angka kelahiran diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan bangsa. Melalui program KB juga diharapkan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dapat teratasi. Pasangan suami dan istri dengan usia antara 15-49 tahun atau disebut juga pasangan usia subur (PUS) merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Pada tahun 2018, persentase wanita 15-49 tahun yang menjadi akseptor KB sebanyak 29,40 persen, tidak menggunakan lagi 12,92 persen dan sisanya 57,68 persen tidak pernah menggunakan. Tingginya persentase wanita 15-49 yang tidak menggunakan lagi dan tidak pernah menggunakan KB perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.





Grafik 7.2. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat KB di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2018

## **BAB 8**

# **KEMISKINAN, POLA KONSUMSI, DAN IPM**

<https://niasselatukab.go.id>



## BAB VIII

### KEMISKINAN, POLA KONSUMSI, DAN IPM

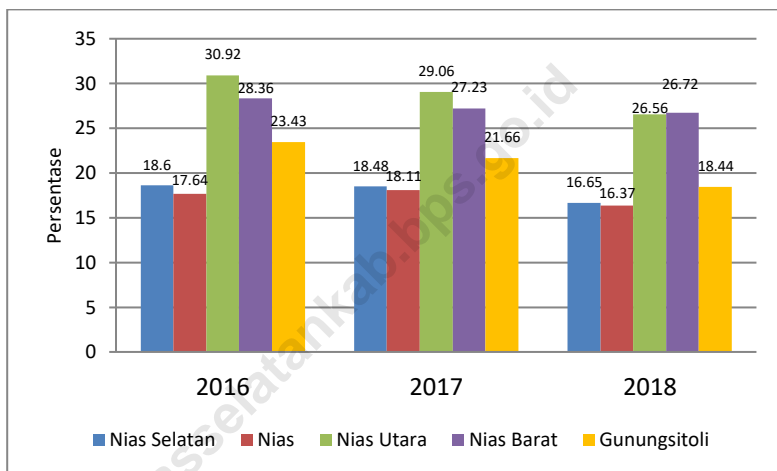
#### 8.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensi, di mana berkaitan dengan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Secara ekonomi kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lain sebagainya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat istiadat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Secara konseptual kemiskinan dibedakan menurut standar penilaiannya yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang bersifat absolut bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga dibandingkan dengan suatu standar tertentu tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat secara umum. Sedangkan kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi yang bersifat relatif bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga dibandingkan dengan taraf hidup masyarakat di sekitarnya.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemiskinan absolut atau dengan ukuran garis kemiskinan (GK). Standar kemiskinan dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup layak dan kebutuhan

non makanan tertentu tanpa memperhitungkan tingkat konsumsi seluruh penduduk. Nilai pengeluaran makanan ini disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Standar minimum untuk makan yang memadai harus dikonsumsi seseorang mengacu pada rekomendasi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 1978. Mereka yang tergolong miskin adalah pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.



Grafik 8.1. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten di Kepulauan Nias , 2016-2018

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2018) persentase penduduk miskin Nias Selatan menunjukkan penurunan, pada tahun 2016 penduduk miskin Nias Selatan sebesar 18,6 persen, kemudian menjadi 18,48 persen pada tahun 2017, dan menjadi 16,65 persen pada tahun 2018. Untuk sekepulauan Nias, Nias Selatan menjadi kabupaten yang terendah persentase penduduk miskinnya setelah kabupaten Nias.

## **8.2. Pola Konsumsi Rumah Tangga**

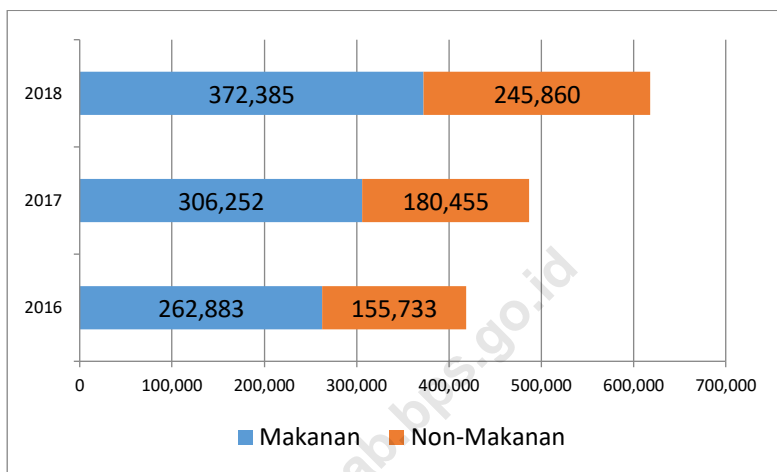
Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga merupakan gambaran kesejahteraan masyarakat. Namun banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau rumah tangga enggan untuk memberikan informasi mengenai besarnya pendapatan yang mereka terima. Oleh karena itu, pendekatan pengeluaran digunakan untuk mendapatkan perkiraan pendapatan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Kedua jenis pengeluaran tersebut dapat menjelaskan dengan cukup baik tentang pola konsumsi masyarakat Nias Selatan. Pengeluaran rumah tangga menggambarkan pengalokasian pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Di daerah yang sedang berkembang, pengeluaran untuk keperluan makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya di daerah yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Sehingga besarnya tingkat pengeluaran non makanan menjadi salah satu ukuran dalam mengukur kemajuan suatu daerah.

### **8.2.1. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita**

Berdasarkan data Susenas tahun 2016 sampai dengan 2018, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Nias Selatan menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Nias Selatan sebesar 418.566 rupiah naik menjadi 486.707 rupiah pada tahun 2017 dan naik kembali pada tahun 2018 menjadi 618.245 rupiah per kapita sebulan. Kenaikan pengeluaran per kapita sebulan dari 2016 ke

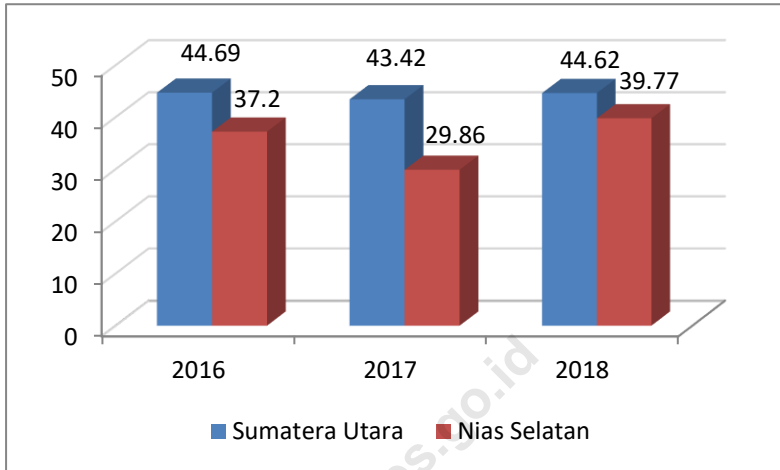
2018 merupakan salah satu indikator peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Nias Selatan.



Grafik 8.2. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Nias Selatan, 2016-2018

### 8.2.2. Persentase Pengeluaran Bukan Makanan Per Kapita/Bulan

Selain pertumbuhan pendapatan/pengeluaran, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan juga dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.



Grafik 8.3. Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Non Makanan di Nias Selatan dan Sumatera Utara, 2016-2018

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir persentase pengeluaran rumah tangga bukan makanan per kapita sebulan menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana pada tahun 2016 persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi bukan makanan di Nias Selatan sebesar 37,2 persen. Pada tahun 2017 turun menjadi 29,86 persen dan tahun 2018 menjadi 39,77 persen. Tingkat kesejahteraan penduduk Nias Selatan yang digambarkan dengan persentase pengeluaran untuk non makanan masih lebih rendah dibanding dengan Sumatera Utara. Secara umum persentase pengeluaran non makanan Sumatera Utara mencapai 44,62 persen pada tahun 2018.

### 8.3. Distribusi Pendapatan

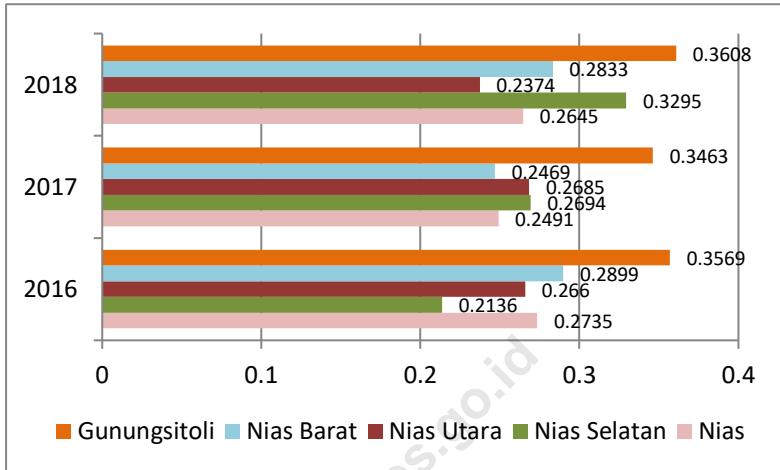
Berdasarkan gambaran pada uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Nias Selatan menunjukkan kondisi yang semakin membaik dari tahun 2017 ke tahun 2018. Namun gambaran baiknya tingkat kesejahteraan ini



belum lengkap jika belum mengetahui tingkat pemerataan pendapatan itu sendiri. Tingginya tingkat kesejahteraan penduduk disuatu daerah tanpa dibarengi dengan adanya pemerataan pendapatan hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial serta dampak multidimensi lainnya.

Masalah ketimpangan pembagian pendapatan tersebut akan terus berlangsung jika tidak ada usaha yang secara khusus diarahkan untuk pemberdayaan mereka yang berada pada posisi yang kurang beruntung. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang menyentuh lapisan masyarakat ekonomi lemah dapat dijadikan sebagai wahana pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembagian pendapatan, beberapa ukuran dan metode telah dikembangkan oleh beberapa peneliti dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Sungguh pun demikian, ukuran yang paling sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 dan 1, dimana semakin besar angka *Gini Ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatannya. *Gini Ratio* = 0 menandakan adanya pemerataan yang sempurna artinya setiap kelompok penduduk mempunyai tingkat pengeluaran (pendapatan) yang sama, sedangkan *Gini Ratio* = 1, berarti terjadi ketimpangan sempurna. Ketimpangan dikatakan rendah jika *Gini Ratio* antara 0 dan 0,3. Sedangkan jika *Gini Ratio* nilainya 0,3 s.d 0,5 dikatakan ketimpangan sedang dan jika nilai *Gini Ratio* antara 0,5 dan 1 dikatakan ketimpangan tinggi.



Grafik 8.4. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten di Kepulauan Nias 2016-2018

Grafik diatas memperlihatkan tingkat ketimpangan penduduk Nias Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016 dan 2017 nilai *Gini Ratio* berada pada kategori ketimpangan rendah yaitu 0,2136 dan 0,2694. Sedangkan pada tahun 2018 berada pada kategori ketimpangan sedang yaitu 0,3295. Data menunjukkan bahwa nilai *Gini Ratio* semakin tinggi, hal ini berarti tingkat pemerataan pendapatan penduduk Nias Selatan semakin timpang.

Tabel 8.1. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2018

Tahun	Nias Selatan	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
2016	0,2136	0,319
2017	0,2694	0,315
2018	0,2645	0,3176

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

#### 8.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi dapat digunakan mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Indeks komposit terdiri dari tiga indikator yaitu: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas, serta standar hidup yang diukur dengan paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Nilai indeks pembangunan manusia berkisar antara 0 sampai dengan 100.

Konsep pembangunan manusia memberi pengaruh yang lebih besar daripada pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena manusia adalah subjek sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri, karena tujuan dari pembangunan ekonomi pada akhirnya untuk kepentingan manusia. Pembangunan manusia merupakan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dengan konsep bahwa pembangunan untuk masyarakat, bukan masyarakat atau manusia untuk pembangunan.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah banyak daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun memiliki kualitas pembangunan manusia yang rendah. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta dinikmati langsung oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu, upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah harus diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Tingkatan status pembangunan manusia dikelompokkan ke dalam empat kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan

rendah. Jika status pembangunan manusia suatu daerah masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia di daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria sedang hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Tabel 8.2. Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
[1]	[2]
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Kualitas pembangunan manusia di Nias Selatan cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 dan 2017 kualitas pembangunan manusia di Nias Selatan masih berada pada status rendah, dan berada pada status sedang pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPM Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016 mencapai 59,14 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 59,85 dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 60,75.

Berdasarkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/ kota di Sumatera Utara, peringkat IPM tertinggi di tahun 2018 adalah Kota Medan menempati peringkat pertama, Kota Pematangsiantar peringkat kedua dan Kota Binjai di peringkat ketiga. Sedangkan Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten dengan peringkat IPM paling rendah di Sumatera Utara.

Sementara itu, Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, Nias Selatan menempati peringkat IPM yang sama yaitu peringkat ke-32 pada tahun 2016 hingga tahun 2018 dengan nilai IPM masing-masing 59,14 , 59,85 dan 60,75.

Tabel 8.3. Perbandingan Tingkat dan Status Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara,2016-2018 (Berdasarkan Metode Baru)

<b>No</b>	<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Nias	59,75	60,21	60,82
2	Mandailing Natal	64,55	65,13	65,83
3	Tapanuli Selatan	68,04	68,69	69,10
4	Tapanuli Tengah	67,27	67,96	68,27
5	Tapanuli Utara	71,96	72,38	72,91
6	Toba Samosir	73,61	73,87	74,48
7	Labuhan Batu	70,50	71,00	71,39
8	Asahan	68,71	69,10	69,49
9	Simalungun	71,48	71,83	72,49
10	Dairi	69,61	70,36	70,89
11	Karo	73,29	73,53	73,91
12	Deli Serdang	73,51	73,94	74,92
13	Langkat	69,13	69,82	70,27
14	Nias Selatan	59,14	59,85	60,75
15	Humbang Hasundutan	66,56	67,30	67,96
16	Pakpak Barat	65,81	66,25	66,63
17	Samosir	68,82	69,43	69,99
18	Serdang Bedagai	68,77	69,16	69,69
19	Batu Bara	66,69	67,20	67,67
20	Padang Lawas Utara	68,05	68,34	68,77
21	Padang Lawas	66,23	66,82	67,59
22	Labuhan Batu Selatan	70,28	70,48	70,98
23	Labuhan Batu Utara	70,26	70,79	71,08
24	Nias Utara	60,23	60,57	61,08
25	Nias Barat	59,03	59,56	60,42

No	Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Kota Sibolga	72,00	72,28	72,65
27	Kota Tanjung Balai	67,09	67,41	68,00
28	Kota Pematang Siantar	76,90	77,54	77,88
29	Kota Tebing Tinggi	73,58	73,90	74,50
30	Kota Medan	79,34	79,98	80,65
31	Kota Binjai	74,11	74,65	75,21
32	Kota Padangsidempuan	73,42	73,81	74,38
33	Kota Gunung Sitoli	66,85	67,68	68,33
<b>SUMATERA UTARA</b>		<b>70,00</b>	<b>70,57</b>	<b>71,18</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara



## **BAB 9**

# **PERUMAHAN**

<https://niasselatankab.go.id>





## **BAB IX**

### **PERUMAHAN**

Pada dasarnya manusia mempunyai tiga kebutuhan pokok yaitu: sandang, pangan, dan papan (perumahan). Untuk kebutuhan perumahan dewasa ini menjadi sangat urgent mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk sedangkan lahan pemukiman semakin berkurang. Tingginya kebutuhan tempat tinggal dan berkurangnya lahan pemukiman mengakibatkan tingginya harga rumah saat ini. Kondisi demikian yang tidak diimbangi dengan tingginya pendapatan masyarakat berpengaruh pada status kepemilikan rumah dan masih banyak masyarakat menempati rumah yang kurang layak, baik dari sisi kepadatan penghuninya maupun dipandang dari segi kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

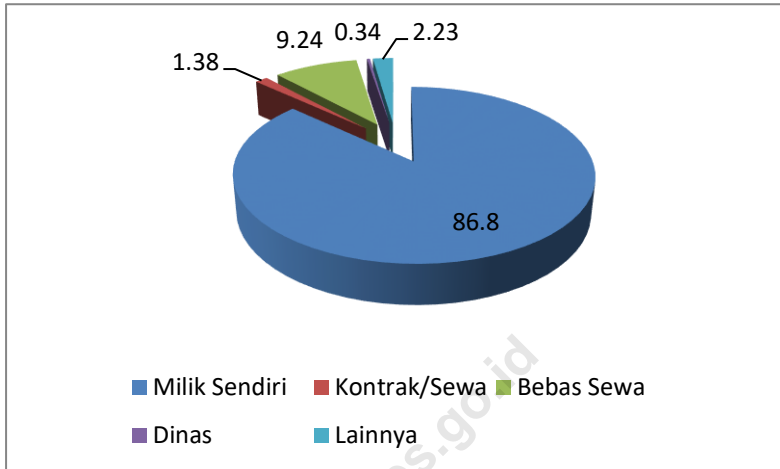
Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan tersebut diantaranya terlihat dari luas lantai, jenis lantai, jenis atap, jenis dinding terluas, dan kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum, dan tempat pembuangan air besar. Kriteria-kriteria tersebut memberikan gambaran tingkat kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat.

Selain kondisi dan fasilitas rumah itu sendiri, tentunya lingkungan perumahan juga perlu diperhatikan. Rumah yang sehat harus didukung oleh tatanan lingkungan perumahan yang sehat pula. Dewasa ini rumah/perumahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh tetapi juga menunjukkan status sosial masyarakat.

### **9.1. Kondisi Rumah**

Salah satu indikator perumahan yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditempatinya.

Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 86,80 persen rumah tangga di Nias Selatan menempati rumah dengan status milik sendiri, sebanyak 1,38 persen rumah tangga yang menempati rumah kontrak/sewa, sebanyak 9,24 persen rumah tangga yang menempati rumah bebas sewa, sebanyak 0,34 persen rumah tangga yang menempati rumah dinas dan sebanyak 2,23 persen lainnya.



Grafik 9.1. Persentase Rumah Tangga di Nias Selatan Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal tahun 2018

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang digunakan yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah diantaranya adalah luas lantai, jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok), dan jenis atap (asbes/seng/genteng). Semakin tinggi nilai keempat indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Nias Selatan menunjukkan perbaikan, terlihat dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai per kapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumah tangga, karena

harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumah maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumah tangga tersebut. Pada tahun 2018 terlihat bahwa rata-rata luas lantai rumah per kapita di Nias Selatan adalah 17,36 m<sup>2</sup>. Sebanyak 89,64 persen rumah tangga menempati rumah yang lantainya bukan dari tanah. Terdapat 55,72 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding tembok, serta 75,17 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan atap beton, genteng, atau seng.

Tabel 9.1. Kondisi Perumahan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]
Rata-rata luas lantai per kapita (m <sup>2</sup> )	14,44	13,62	17,36
Rumah tangga dengan lantai bukan tanah (%)	84,70	86,74	89,64
Rumah tangga dengan dinding tembok (%)	38,22	45,80	55,72
Rumah tangga dengan atap beton, genteng, sirap, dan seng (%)	65,98	69,97	75,17

Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan (Susenas 2016-2018)

## 9.2. Fasilitas Rumah

Rumah yang layak dan sehat selain dilihat dari kondisinya juga ketersediaan fasilitas pendukung perumahan yang utama diantaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya.

Tabel 9.2. Fasilitas Perumahan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]
Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	67,76	55,00	68,91
Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri (%)	34,36	28,54	30,22
Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri (%)	43,15	55,95	53,66

Sumber: BPS Kabupaten Nias Selatan (Susenas 2016-2018)

Dari Tabel 9.2 dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 68,91 persen rumah tangga di Nias Selatan menggunakan penerangan listrik baik PLN maupun non PLN. Persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 55,00 persen pada tahun 2017. Ketersediaan penerangan listrik tentunya akan memudahkan masyarakat dalam menerima informasi dan beraktifitas di malam hari.

Kemudian dari aspek sumber air minum sebanyak 30,22 persen rumah tangga memiliki fasilitas air minum sendiri pada tahun 2018 dan sisanya menggunakan secara bersama-sama, fasilitas umum dan lainnya. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 28,54 persen rumah tangga memiliki fasilitas air minum sendiri dan sisanya menggunakan secara bersama-sama, fasilitas umum dan lainnya.

Selain kedua fasilitas perumahan di atas fasilitas perumahan yang sangat penting adalah status kepemilikan jamban atau fasilitas tempat buang air besar. Tahun 2016 persentase rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar sendiri sebanyak 46,3 persen sementara sisanya menggunakan jamban bersama, jamban umum dan tidak memiliki jamban. Kondisi

fasilitas buang air besar sendiri mengalami peningkatan namun pada tahun 2015 menjadi 52,5 persen di 2015 dan kemudian turun menjadi 43,1 persen pada tahun 2016.

<https://niasselatankab.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Jl. Baloho Indah, Telukdalam - 22865

Telp/Fax : (0639) 7321139

Homepage: <http://www.niasselatankab.bps.go.id>

Email : [bps1214@bps.go.id](mailto:bps1214@bps.go.id)

ISBN 978-602-5537-86-8

